

NOTULENSI FORUM RPP IRIGASI KOMIR DIY

Yogyakarta, 23 Juni 2022

Direktorat Sumber Daya Air, Kedeputian Sarana dan Prasarana

KEMENTERIAN PPN / BAPPENAS



KMCDIPIBappenas



kmc.bappenas@gmail.com

Ucapan Terimakasih

Forum Penjaringan Aspirasi Komisi Irigasi DIY bagi penyempurnaan draft RPP Irigasi diprakarsai oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY (PUPESDM DIY) dengan mengundang instansi anggota Komisi Irigasi DIY dan mengundang instansi: Direktorat Irigasi dan Rawa Kementerian PUPR; Direktorat Sumber Daya Air Bappenas, BBWS Serayu Opak, dan Konsultan Pendukung IPDMIP. Direktorat Bappenas melalui Direktorat Sumber Daya Air mempertegas undangan Komir DIY tersebut dengan menerbitkan undangan kepada instansi terkait lainnya (undangan terlampir).

Atas terselenggaranya sidang/penjaringan aspirasi Komisi Irigasi DIY, disampaikan penghargaan dan terima kasih kepada: Narasumber (*resource person*), Tim Perumus/Notulen, dan Tim Penyelenggara Forum Penjaringan Aspirasi Komisi Irigasi DIY. Penghargaan dan terima kasih dihaturkan kepada:

1. Abdul Malik Sadat Idris, S.T., M.Eng. selaku Direktur Sumber Daya Air, Kementerian PPN/ Bappenas
2. Ir. Juari, ME selaku Koordinator Pendayagunaan Sumber Daya Air, Direktorat Sumber Daya Air, Bappenas/Kementerian PPN
3. Dinas PU ESDM DIY
4. Komisi Irigasi DIY
5. Tim Perumus dari KMC IPDMIP:
 - a. Ir. Sudar Dwi Atmanto
 - b. Sidik Permana Ali Muhtaj, S.T.
 - c. Aris Kurniawan, S.T.
 - d. Khuswatun Chasanah, S.T.
 - e. Fikry Asri Islami, S.T., M.Si
 - f. Rachmat Wildan, S.Stat
 - g. Arvin Kresnaufal, S.T.P
 - h. Aldila Utami Hapsari, S.I.Kom
 - i. Sekar Adjeng Bramesti, S.E., Akt.
 - j. Dewi Sri Wahyuni, S.I.Kom
 - k. Vera Nita, Amd.
 - l. Rizki Agung Hermanto, S.E.
6. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten serta P3A/GP3A dan Komisi Irigasi di Provinsi DIY sebagai peserta diskusi
7. Peserta undangan instansi lainnya: Direktorat Irigasi dan Rawa Kementerian PUPR, Direktorat SUPD II Kementerian Dalam Negeri.

Kata Pengantar

Direktur Sumber Daya Air Kementerian PPN/Bappenas

Abdul Malik Sadat Idris, S.T, M.Eng.

Alhamdulillah, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T. atas suksesnya penyelenggaraan dan terselesaikannya notulensi "Forum Penjaringan Aspirasi Komisi Irigasi DIY untuk Penyempurnaan draft RPP Irigasi" yang dilaksanakan bersama para pemerintah daerah DIY, Komisi Irigasi DIY dan P3A/GP3A. Penyusunan notulensi ini dilakukan dengan memperhatikan semua hal yang disampaikan selama diskusi serta masukan tertulis yang diberikan oleh peserta. Masukan tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara statistika sederhana yang ditampilkan dalam bentuk visualisasi diagram dengan tujuan mempermudah menangkap keberagaman hasil penyampaian aspirasi dalam forum ini. Secara garis besar masukan yang disampaikan selama Forum Penjaringan Aspirasi Komisi Irigasi DIY ini dikelompokkan menjadi tujuh isu yaitu Pengelolaan Irigasi, Kelembagaan, Single Management Irigasi, Kewenangan, Partisipasi Irigasi, Tata Kelola Air, dan Sumber Daya Manusia.

Terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya Tim Perumus dari Bappenas yang telah berkontribusi dalam menyusun notulensi ini serta kepada Dinas PUPESDM DIY yang telah menyelenggarakan Forum Penjaringan Aspirasi Komisi Irigasi guna menyempurnakan RPP Irigasi dan Direktorat Irigasi Rawa Kementerian PUPR yang telah memberikan perkembangan draft RPP Irigasi dan memberikan respon terhadap forum ini. Semoga bermanfaat terhadap penyempurnaan RPP Irigasi, dan juga secara umum terhadap pengembangan dan pengelolaan irigasi dan pertanian. Sebagai penutup, kami sampaikan permohonan maaf atas hal - hal yang tidak pas dan kurang berkenan dari Direktorat Sumber Daya Air Bappenas dalam memfasilitasi diskusi Penjaringan Aspirasi Komisi Irigasi DIY untuk Penyempurnaan draft RPP Irigasi.

*Kementerian PPN/
Bappenas*

Jakarta, 1 Juli 2022

Daftar Isi

Ucapan Terimakasih	2
Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
Daftar Tabel	5
Daftar Gambar.....	5
A. Pendahuluan.....	6
A.1. Latar Belakang	6
A.2. Tujuan	6
B. Sambutan dan Arahan pada Sesi Pembukaan	6
B.1. Sambutan Perwakilan Kepala Dinas PUPESDM Provinsi DIY	7
B.2. Arahan Koordinator Pendayagunaan Sumber Daya Air, Direktorat SumberDaya Air, Kedeputan Sarana Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas	7
C. Hasil Diskusi.....	8
C.1. Klasifikasi Isu dan Sub Isu	8
C.1.1. Isu Kelembagaan	12
C.1.2. Isu Kewenangan	14
C.1.3. Isu Partisipasi Irigasi	16
C.1.4. Isu Pengelolaan Irigasi	19
C.1.6. Isu Sumber Daya Manusia	24
C.1.7. Isu Tata Kelola Air.....	25
D. Penutup.....	27
E. Lampiran.....	29
E.1. Lampiran Bahan Forum RPP Irigasi Sebelumnya	29
E.2. Lampiran Surat Undangan.....	30

Daftar Tabel

Tabel 1 Keterangan Klasifikasi Isu dan Sub-Isu Berdasarkan Forum Aspirasi Komir DIY	8
Tabel 2 Sebaran Frekuensi dalam Isu Kelembagaan.....	12
Tabel 3 Uraian Penyampaian dalam Isu Kelembagaan	13
Tabel 4 Sebaran Frekuensi dalam Isu Kewenangan.....	14
Tabel 5 Uraian Penyampaian dalam Isu Kewenangan	15
Tabel 6 Sebaran Frekuensi dalam Isu Partisipasi Irigasi.....	16
Tabel 7 Uraian Penyampaian dalam Isu Partisipasi Irigasi	17
Tabel 8 Masukan Isu Pengelolaan Irigasi.....	19
Tabel 9 Uraian Penyampaian dalam Isu Pengelolaan Irigasi	20
Tabel 10 Sebaran Frekuensi dalam Isu Single Management Irigasi.....	21
Tabel 11 Uraian Penyampaian dalam Isu <i>Single Management</i> Irigasi	22
Tabel 12 Sebaran Frekuensi dalam Isu Sumber Daya Manusia	24
Tabel 13 Uraian Penyampaian dalam Isu Sumber Daya Manusia	24
Tabel 14 Sebaran Frekuensi dalam Isu Tata Kelola Air	25
Tabel 15 Uraian Penyampaian dalam Isu Tata Kelola Air	25

Daftar Gambar

Gambar 1 Sebaran Frekuensi Isu dan Sub-Isu Berdasarkan Forum Aspirasi Komir DIY	10
Gambar 2 Persentase Isu Berdasarkan Forum Aspirasi Komir DIY	11
Gambar 3 Persentase Sub Isu Berdasarkan Forum Aspirasi Komir DIY	11
Gambar 4 Persentase dalam Isu Kelembagaan	12
Gambar 5 Persentase dalam Isu Kewenangan	14
Gambar 6 Persentase dalam Isu Partisipasi Irigasi	17
Gambar 7 Persentase dalam Isu Pengelolaan Irigasi	19
Gambar 8 Persentase dalam Isu <i>Single Management</i> Irigasi	22
Gambar 9 Persentase dalam Isu Sumber Daya Manusia	24
Gambar 10 Persentase dalam Isu Tata Kelola Air	25

A. Pendahuluan

A.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pada Pasal (78) mengamanahkan bahwa peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini ditetapkan, yakni pada akhir tahun 2019. Lampiran I Perpres No. 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, pada Bab V, Sub Bab 5.2.1 telah mengagendakan penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Irigasi, yang menegaskan penyelesaian RPP Irigasi pada tahun 2021. Disisi lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengatur kembali atau memperbaharui pengaturan beberapa ketentuan dalam UU No.17/2019 tentang Sumber Daya Air yang perlu diperhatikan bagi penyusunan peraturan pelaksanaannya.

Mempertimbangkan kaidah *legal drafter* dan mengacu pada pengalaman penyusunan PP Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (yang tidak berlaku pasca putusan MK), serta penyusunan masukan konsep RPP Irigasi pada forum yang telah dilaksanakan sebelumnya, penyusunan RPP tentang Irigasi ini lebih memperhatikan tingkat kedetailan cakupan yang akan diatur. Harapannya penyusunan RPP Irigasi sebaiknya juga dilakukan secara paralel dengan penyusunan peraturan perundangan dibawahnya yang lebih detail (misalnya Peraturan Menteri) untuk lebih bisa menjaga konsistensi cakupan dan kedetailan isu yang diatur.

Dengan semangat gotong royong yang dilandasi oleh kesadaran bahwa penyusunan RPP tentang Irigasi merupakan tugas Pemerintah, Dinas PUPESDM DIY merupakan salah satu dan satu-satunya sampai saat ini yang menginisiasi Forum Penjaringan Aspirasi Komisi Irigasi DIY dengan mengundang Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten serta P3A/GP3A di Daerah Istimewa Yogyakarta. Forum penjaringan aspirasi ini diharapkan bisa menjadi wadah untuk menampung aspirasi dari Komisi Irigasi DIY guna penyempurnaan RPP Irigasi.

A.2. Tujuan

Secara garis besar, Forum Penjaringan Aspirasi Komisi Irigasi DIY bertujuan sebagai forum diskusi untuk menjaring aspirasi dari Pemerintah Daerah, Komisi Irigasi serta P3A/GP3A di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam rangka penyempurnaan RPP Irigasi yang sedang disusun oleh Direktorat Irigasi dan Rawa, Ditjen Sumber Daya Air.

B. Sambutan dan Arahan pada Sesi Pembukaan

Sambutan pada pelaksanaan Forum Penjaringan Aspirasi Komisi Irigasi DIY disampaikan oleh Bapak Subarja, ST selaku Kepala Sekretariat Komisi Irigasi Dinasi PUPESDM DIY dan arahan disampaikan oleh Bapak Ir. Juari Sutrisno selaku Koordinator Pendayagunaan SDA Kementerian PPN/Bappenas. Adapun sambutan pembukaan adalah sebagai berikut:

B.1. Sambutan Perwakilan Kepala Dinas PUPESDM Provinsi DIY

Forum Penjaringan Aspirasi Komisi Irigasi DIY dimaksudkan untuk penyempurnaan dan percepatan penetapan draft RPP Irigasi yang sedang disusun sebagai perdoman dalam pelaksanaan kegiatan di bidang SDA/Irigasi. Dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan irigasi yang baik berdasarkan UU yang telah diamanatkan, melalui lembaga koordinasi Pemerintah Daerah DIY telah membentuk Komisi Irigasi melalui Surat Gubernur No. 249/2010 (30 Oktober 2010) tentang Komisi Irigasi DIY.

Komisi Irigasi provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemda provinsi dengan wakil P3A di level DI, wakil pengguna irigasi provinsi, dan wakil Komir kabupaten/kota. Komisi irigasi memiliki peran sentral dalam pengelolaan irigasi yang mencakup penyediaan air, infrastruktur, manajemen, kelembagaan, dan SDM untuk mewujudkan ketahanan pangan. Komisi Irigasi melakukan komunikasi dan koordinasi dalam pengelolaan irigasi sesuai dengan kewenangannya. Pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai kepentingan masih mengalami kendala teknis dan sosial, sehingga belum optimal dan masih mengalami kendala/persoalan yang tidak terselesaikan antar pihak (multi pihak) baik dari pemerintah dan non pemerintah. Komisi Irigasi hadir sebagai wadah komunikasi dan koordinasi. Sekretariat Komisi Irigasi DIY mencoba menjaring segala permasalahan/persoalan keirigasian untuk dikoordinasikan di level Komisi Irigasi untuk menjawab permasalahan yang ada.

Semoga forum ini menjadi wadah yang bermanfaat untuk menjaring aspirasi dari Komisi Irigasi guna penyempurnaan RPP Irigasi yang sedang disusun. Sekali lagi terimakasih kepada semua pihak yang turut hadir dan berpartisipasi aktif baik secara *offline* maupun *online*.

B.2. Arahan Koordinator Pendayagunaan Sumber Daya Air, Direktorat Sumber Daya Air, Kedeputian Sarana Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas

Dalam Undang-Undang No. 17/2019, fungsi pelayanan irigasi tidak hanya untuk padi, namun juga untuk komoditas lain (non padi). Dalam UU ini disebutkan secara tegas untuk ketahanan pangan, termasuk hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan juga kehutanan. Batasan skala kebutuhan air adalah kebutuhan air untuk pertanian, yaitu 2l/dt/hari. Jika isu di daerah tidak hanya padi, maka keanggotan Komisi Irigasi di dalam Dinas harus dikembangkan sesuai dengan daerah administrasi/daerah kewenangannya.

Isu *Single Management* Irigasi menjadi perhatian nasional. Terdapat permasalahan ketidaksesuaian kriteria teknis KP dalam pelaksanaan irigasi. Stakeholders yang melaksanakan pengelolaan irigasi perlu ditingkatkan dari saluran primer hingga tersier, sehingga Kementerian Pertanian dapat masuk di level tersier tersebut. Dalam pelaksanaan intervensi Kementerian Pertanian di level tersier, mengacu pada desain sesuai standar teknis yang sudah tersedia/disiapkan oleh PUPR. Secara teknis keirigasian istilah SMI ini tidak ada, namun perlu adanya sinergi dan kolaborasi satu kesatuan pengaturan irigasi dan pertanian dari semua level pusat maupun daerah. Selain itu juga perlunya sinergi pemanfaatan satu data (*one map policy*). Perubahan batasan kewenangan yang sudah dirumuskan mengalami

pengurangan luasan, yaitu sbb: i) kewenangan kabupaten < 500 ha; ii) kewenangan provinsi 500 - 2000 ha; iii) kewenangan pusat > 2000 ha.

Irigasi yang merupakan bagian dari layanan publik, sehingga menjadi hal yang sangat krusial jika terjadi perubahan luasan/kewenangan. Enam isu lain yang sudah dibahas dalam forum RPP Irigasi sebelumnya yaitu 1) irigasi non padi; 2) single management irigasi (SMI); 3) modernisasi irigasi; 4) pengelolaan lahan rawa; 5) sinergitas pengelolaan lahan dan pengelolaan irigasi; 6) pemanfaatan air tanah untuk irigasi. Untuk modernisasi irigasi, pemerintah pusat sedang melaksanakan pilot untuk melakukan efisiensi alokasi irigasi dengan adanya ketersediaan air yang semakin menurun. Meskipun sudah ada SE Dirjen SDA tentang modernisasi irigasi, namun pelaksanaan MI masih di level pusat. Di Kementerian Pertanian ada pemanfaatan pipa paralon untuk pelaksanaan efisiensi irigasi. Pengelolaan irigasi di level lahan (sawah) perlu sinergi pengelolaan irigasi dan pertanian. Pemanfaatan air tanah di DIY terutama Gunung Kidul.

C. Hasil Diskusi

C.1. Klasifikasi Isu dan Sub Isu

Berdasarkan pelaksanaan Forum Penjaringan Aspirasi Komisi Irigasi DIY yang diselenggarakan oleh Dinas PUPESDM DIY bersama Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten terkait dan anggota Komisi Irigasi serta P3A/GP3A, didapatkan hasil keseluruhan diskusi yang disusun berdasarkan isu dan diklasifikasikan sesuai kedalam sub isu. Kemudian dipisahkan kembali terkait pendapat yang bersifat usulan atau masukan baru. Hasil Forum Penjaringan Aspirasi Komisi Irigasi ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam penyempurnaan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Irigasi. Adapun hasil klasifikasi isu dan sub isu aspirasi komisi irigasi dapat dilihat pada **Tabel 1** dan **Gambar 1** dibawah ini.

Tabel 1 Keterangan Klasifikasi Isu dan Sub-Isu Berdasarkan Forum Aspirasi Komir DIY

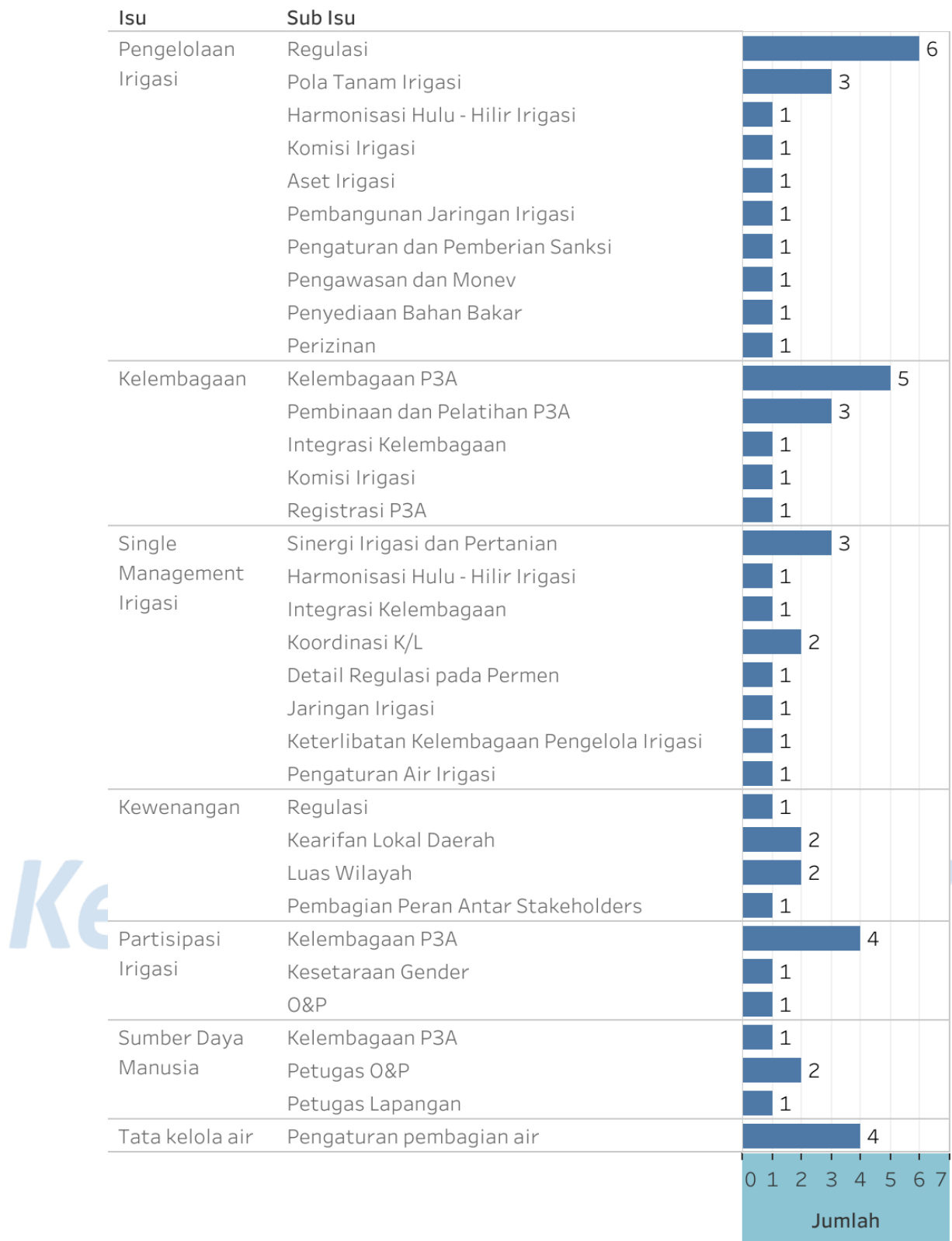
Isu	Jumlah	Sub Isu	Jumlah
Pengelolaan Irigasi	17	Regulasi	6
		Pola Tanam Irigasi	3
		Aset Irigasi	1
		Harmonisasi Hulu - Hilir Irigasi	1
		Komisi Irigasi	1
		Pembangunan Jaringan Irigasi	1
		Pengaturan dan Pemberian Sanksi	1
		Pengawasan dan monev	1
		Penyediaan bahan bakar	1
		Perizinan	1
Kelembagaan	11	Kelembagaan P3A	4
		Pembinaan dan Pelatihan P3A	3

Isu	Jumlah	Sub Isu	Jumlah
		Fasilitasi Kelembagaan P3A	1
		Integrasi kelembagaan	1
		Komisi Irigasi	1
		Registrasi P3A	1
Single Management Irigasi	11	Sinergi irigasi dan pertanian	3
		Koordinasi K/L	2
		Detail regulasi pada Permen	1
		Harmonisasi Hulu - Hilir Irigasi	1
		Integrasi kelembagaan	1
		Jaringan Irigasi	1
		Keterlibatan Kelembagaan Pengelola Irigasi	1
		Pengaturan Air Irigasi	1
Kewenangan	6	Kearifan Lokal Daerah	2
		Luas Wilayah	2
		Regulasi	1
		Pembagian peran antar stakeholders	1
Partisipasi Irigasi	6	P3A	4
		Kesetaraan Gender	1
		O&P	1
Tata kelola air	4	Pengaturan pembagian air	4
Sumber Daya Manusia	3	Petugas O&P	2
		P3A	1
Kepegawaian	1	Petugas Lapangan	1

Berdasarkan **Tabel 1** diketahui bahwa pembahasan dalam Forum Penjaringan Aspirasi Komisi Irigasi DIY diklasifikasikan kedalam 7 (tujuh) isu, dengan total keseluruhan terdapat 35 (tiga puluh lima) sub isu. Isu yang diklasifikasikan merupakan masukan atau usulan untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Irigasi. Isu tersebut meliputi Isu Pengelolaan Irigasi (terdapat 10 sub isu), Isu Kelembagaan (terdapat 6 sub isu), Isu Single Management Irigasi (terdapat 8 sub isu), Isu Kewenangan (terdapat 4 sub isu), Isu Partisipasi Irigasi (terdapat 3 sub isu), Isu Tata Kelola Air (terdapat 1 sub isu), dan Isu Sumber Daya Manusia (terdapat 2 sub isu).

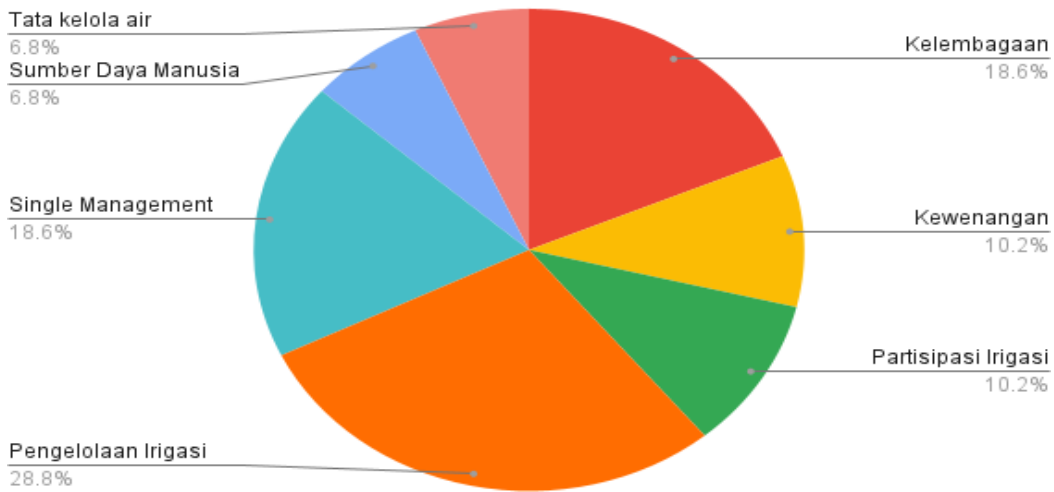
Mengingat dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Irigasi ini belum memuat hal-hal yang ada dalam usulan Forum Penjaringan Aspirasi ini, maka isu dan sub isu yang muncul merupakan hal baru, seperti contoh terkait Kearifan Lokal Daerah. Hal yang bersifat detail dan teknis akan disampaikan dalam Peraturan Menteri yang merujuk dari RPP tentang Irigasi ini. Adapun sebaran frekuensi isu dan sub isu ditampilkan pada **Gambar 1** dibawah. Sedangkan persentase masukan yang diklasifikasikan dalam isu dan sub isu ada pada **Gambar 2**.

ISU & SUB ISU Aspirasi Komir DIY



Gambar 1 Sebaran Frekuensi Isu dan Sub-Isu Berdasarkan Forum Aspirasi Komir DIY

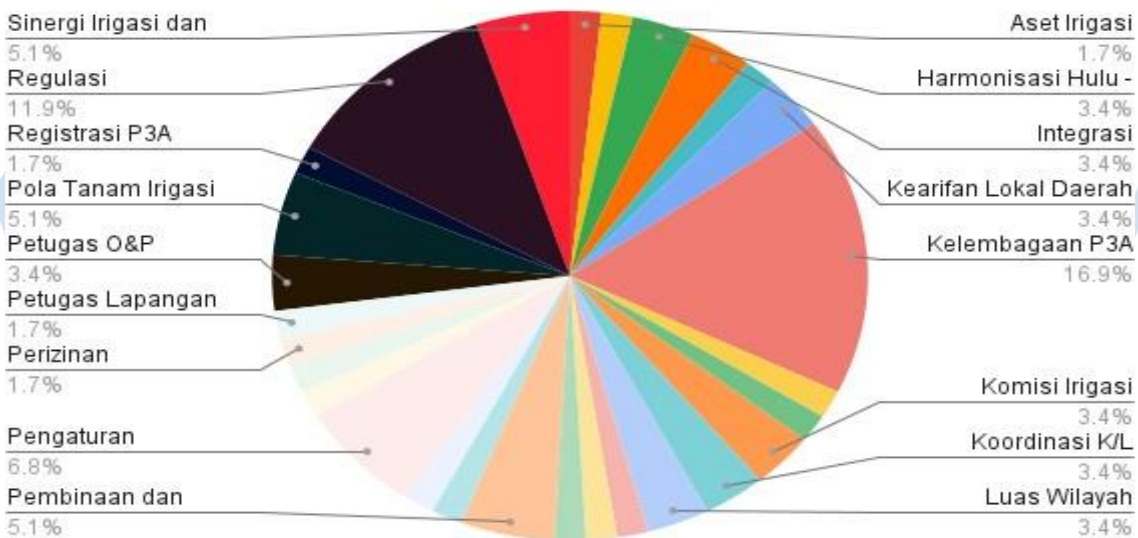
ISU ASPIRASI KOMIR DIY



Gambar 2 Persentase Isu Berdasarkan Forum Aspirasi Komir DIY

Berdasarkan pada **Gambar 2** di atas, dapat terlihat sebaran isu yang disampaikan dalam forum aspirasi Komir DIY, dengan persentase dari yang paling besar yaitu isu Pengelolaan Irigasi 28.8% SMI, Kelembagaan 18.6%, Kewenangan 10.2%, Partisipasi Irigasi 10.2%, Tata Kelola Air 6.8%, dan SDM 5.1%. Sub isu yang dibahas secara lebih detail dilihat pada Gambar 3 berikut.

SUB ISU ASPIRASI KOMIR DIY



Gambar 3 Persentase Sub Isu Berdasarkan Forum Aspirasi Komir DIY

Berdasarkan pada Gambar 3, terdapat banyak sub isu yang dibahas dalam forum Komisi Irigasi Provinsi DIY, yaitu 1) Kelembagaan P3A; 2) Pengaturan pembagian air; 3)

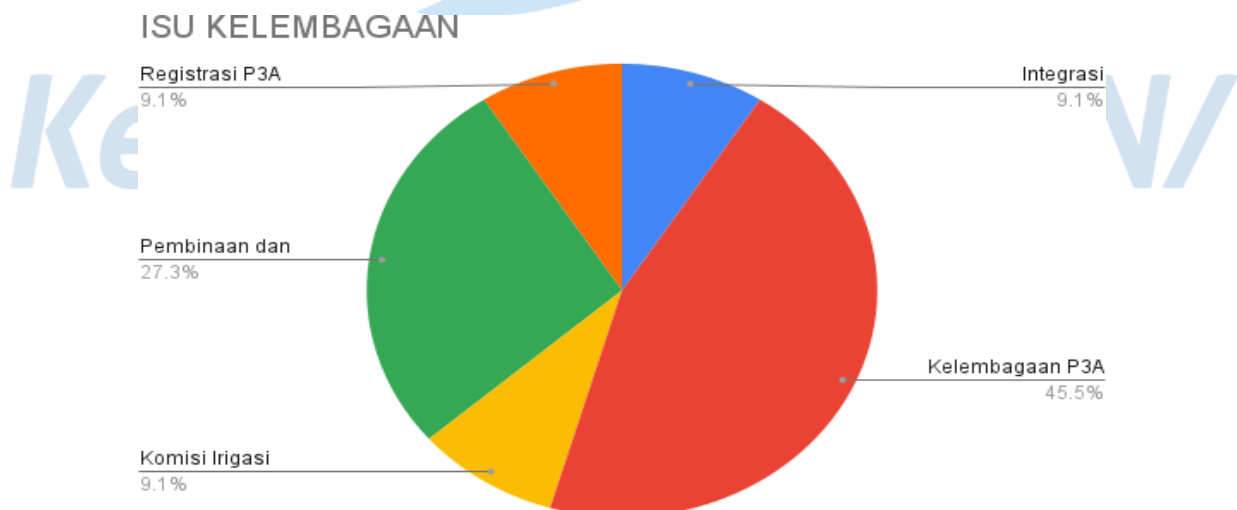
Pembinaan dan Pelatihan P3A; 4) Pola Tanam Irigasi; 5) Sinergi irigasi dan pertanian; 6) Harmonisasi Hulu - Hilir Irigasi; 7) Integrasi kelembagaan; 8) Kearifan Lokal Daerah; 9) Komisi Irigasi; 10) Koordinasi K/L; 11) Luas Wilayah; 12) Petugas O&P; 13) Aset Irigasi; 14) Detail regulasi pada Permen; 15) Fasilitasi Kelembagaan P3A; 16) Jaringan Irigasi; 17) Kesetaraan Gender; 18) Keterlibatan Kelembagaan Pengelola Irigasi; 19) O&P; 20) Pembagian peran antar stakeholders; 21) Pembangunan Jaringan Irigasi; 22) Pengaturan Air Irigasi; 23) Pengaturan dan Pemberian Sanksi; 24) Pengawasan dan monev; 25) Penyediaan bahan bakar; 26) Perizinan; 27) Petugas Lapangan; 28) Registrasi P3A.

C.1.1. Isu Kelembagaan

Masukan dalam Forum Penjaringan Aspirasi Komisi Irigasi DIY yang sering disampaikan salah satunya adalah tentang Isu Kelembagaan. Dalam isu kelembagaan mencakup sub isu Integrasi Kelembagaan, Kelembagaan P3A, Komisi Irigasi, Pembinaan dan Pelatihan P3A, dan Registrasi P3A. Sebaran frekuensi sub isu dalam isu kelembagaan dijelaskan pada **Tabel 2** dibawah.

Tabel 2 Sebaran Frekuensi dalam Isu Kelembagaan

Isu	Sub Isu	Jumlah
Kelembagaan	Integrasi Kelembagaan	1
	Kelembagaan P3A	5
	Komisi Irigasi	1
	Pembinaan dan Pelatihan P3A	3
	Registrasi P3A	1
		11



Gambar 4 Persentase dalam Isu Kelembagaan

Berdasarkan Tabel 2 dan Gambar 3, sub isu kelembagaan P3A menjadi bahasan yang cukup banyak disampaikan oleh peserta forum diskusi. Kelembagaan P3A dalam hal ini

masih menjadi permasalahan terkait register dan administrasi P3A. Sub isu kelembagaan P3A sebanyak 45.5% dengan penyampai sebanyak 5 orang. Pembinaan dan Pelatihan P3A sebanyak 27.3% dengan penyampai sebanyak 3 orang. Pembinaan dan pelatihan P3A masih minim dilakukan oleh pemerintah, sehingga penyampaian dalam forum diskusi komisi irigasi ini banyak membahas dan memberikan masukan untuk pembinaan dan pelatihan untuk P3A. Sedangkan untuk Integrasi Kelembagaan, Registrasi P3A dan Komisi Irigasi masing-masing 9.1% dengan satu orang penyampai. Uraian penyampaian masukan dalam isu kelembagaan dijelaskan pada **Tabel 3** dibawah.

Tabel 3 Uraian Penyampaian dalam Isu Kelembagaan

No.	Uraian Penyampaian	Sub Isu
1	Kelembagaan yang diatur dalam Perda, banyak kegiatan P3A yang diampu oleh PUP ESDM DIY. Sementara keanggotaan dan kelembagaan antara P3A dan Poktan mirip (petani menjadi anggota Poktan dan P3A) dengan wadah lembaga yang berbeda. Apakah Dinas Pertanian bisa mengampu Poktan/P3A - dan apakah P3A juga akan diampu oleh PU?	Pembinaan dan Pelatihan P3A
2	Terkait dengan P3A, harapannya pembinaannya tetap ada di PU karena kondisi jaringan irigasi di DIY ada jaringan interkoneksi yang selama ini ditangani oleh PU dan sudah berjalan komunikasi yang baik bersama P3A di wilayah masing-masing. Harapannya P3A juga dapat teregistrasi seperti Poktan (SIMLUHTAN) untuk menjadi bagian dari sistem irigasi dan melaksanakan pemberdayaan dan menerima manfaat dari OP. Terkait petugas OP, ada kendala jumlah PNS di lapangan. Harapannya, petugas O&P non PNS bisa ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan O&P di daerah baik level juru maupun pengamat, karena selama ini ada benturan dengan status PNS dalam pelaksanaannya.	Integrasi Kelembagaan
3	Kelembagaan pengelola irigasi dalam hal ini P3A, masih banyak yang tidak memiliki anggota atau sangat minim anggotanya. Sehingga tidak sebanding dengan tugas dan tanggungjawab yang harus diemban terutama dalam peningkatan jaringan irigasi tersier serta O&P.	Kelembagaan P3A
4	Pembinaan yang diberikan masih di level GP3A dan IP3A, sedangkan untuk P3A masih belum ada yang memfasilitasi (mengkoordinir). Sehingga pembinaan pada tingkat P3A masih harus ditingkatkan.	Pembinaan dan Pelatihan P3A
5	Pada Daerah Irigasi (DI) Blawong masih belum memadai fasilitas kelembagaan P3A berupa kantor UPT. Di lapangan hanya tersedia rumah jaga bendung yang sementara difungsikan untuk kantor UPT.	Kelembagaan P3A
6	Perlu ada dasar/landasan hukum yang jelas terhadap register kelembagaan P3A yang juga mencerminkan hak-hak dari P3A khususnya mengenai operasi dan pemeliharaan daerah irigasi.	Kelembagaan P3A
7	Kelembagaan P3A dianjurkan menjadi badan hukum agar hak dan kewajiban P3A lebih jelas terutama dalam menjalankan kontrak kerja dengan dana APBN/APBD.	Kelembagaan P3A
8	Pembinaan P3A masih kurang optimal, sehingga dalam RPP perlu dirumuskan mengenai instansi yang bertanggung jawab dalam pembinaan P3A.	Pembinaan dan Pelatihan P3A
9	Kelembagaan komisi irigasi pusat diharapkan menjadi wadah koordinasi dan mengakomodir komir-komir di tingkat provinsi dan daerah.	Komisi Irigasi

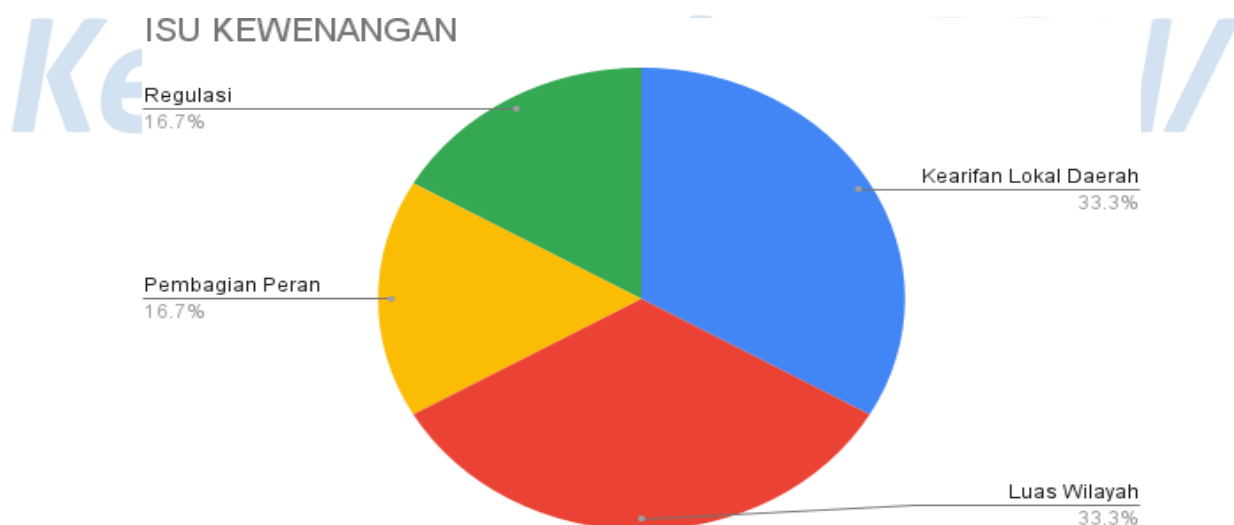
No.	Uraian Penyampaian	Sub Isu
10	Sebaiknya dalam RPP diatur tentang register P3A.	Kelembagaan P3A
11	Dalam kegiatan Kementerian Pertanian, banyak melibatkan P3A dimana salah satu persyaratan yang harus dipenuhi yaitu legalitas ataupun registrasi kelompok/P3A untuk menerima bantuan hibah, agar tidak bermasalah dengan pengawasan BPK. Maka Dinas Pertanian melalui kegiatan Kostratani berupaya untuk memasukan kelompok P3A dalam SIMLUHTAN, namun terdapat kendala dengan petani yang menjadi anggota Poktan sekaligus P3A (<i>double data</i>). Oleh karena itu, register P3A merupakan keharusan agar P3A yang teregister pada Pemerintah Daerah (diberlakukan khusus untuk kelompok P3A sesuai Perda), dapat dikeluarkan dari SIMLUHTAN.	Registrasi P3A

C.1.2. Isu Kewenangan

Isu kewenangan menjadi isu yang mendapat perhatian (*concern*) dalam Forum Penjaringan Aspirasi Komisi Irigasi DIY. Dalam isu kewenangan mencakup sub isu Kearifan Lokal Daerah, Luas Wilayah, Pembagian Peran Antar Stakeholders, dan Regulasi. Sebaran frekuensi sub isu dalam isu kewenangan dijelaskan pada **Tabel 4** dibawah.

Tabel 4 Sebaran Frekuensi dalam Isu Kewenangan

Isu	Sub Isu	Jumlah
Kewenangan	Kearifan Lokal Daerah	2
	Luas Wilayah	2
	Pembagian Peran Antar Stakeholders	1
	Regulasi	1
		6



Gambar 5 Persentase dalam Isu Kewenangan

Berdasarkan Tabel 4 dan Gambar 5, sub isu Luas Wilayah dan Kearifan Lokal Daerah menjadi bahasan yang cukup banyak disampaikan oleh peserta forum diskusi. Luas wilayah yang disampaikan terkait perubahan kewenangan daerah sesuai luasan daerah irigasi. DIY terkenal kental dengan kearifan lokal dan budaya daerah, sehingga dalam forum ini banyak disampaikan usulan atau masukan yang mempertimbangkan sub isu kearifan lokal daerah. Sub isu kearifan lokal daerah dan luas wilayah sebanyak 33.3% dengan penyampai masing-masing sebanyak 2 orang. Sedangkan untuk sub isu regulasi dan pembagian peran stakeholders disampaikan masing-masing oleh satu penyampai. Uraian penyampaian masukan dalam isu kewenangan dijelaskan pada **Tabel 5** dibawah.

Tabel 5 Uraian Penyampaian dalam Isu Kewenangan

No.	Uraian Penyampaian	Sub Isu
1	Jika PDAM lebih memilih sumber air di Serokan Makmur (terdapat sumur air tanah yang dimanfaatkan untuk PDAM dan petani) yang merupakan sungai bawah tanah, bisa jadi sudah ada pertimbangan detail dari PDAM untuk menjamin ketersediaan air. Sehingga, pemerintah daerah harus memberikan solusi kepada P3A atas ketersediaan sumber air bagi petani yang berkompetisi dengan sumber air untuk PDAM.	Pembagian Peran Antar Stakeholders
2	Pengaturan terkait petugas pengelola air termasuk P3A, dalam konteks keistimewaan Yogyakarta merupakan bagian dari objek kebudayaan/cultural. Sebaiknya dalam RPP Irigasi mengatur dan membahas mengenai asas kearifan lokal/daerah dalam pengelolaan irigasi.	Kearifan Lokal Daerah
3	RPP Irigasi sebaiknya mempertimbangkan aspek kebudayaan dan kearifan lokal untuk menjadi dasar hukum bersama. Mengingat Pemerintah DIY mempunyai Perda Istimewa (Perdais), maka dalam sidang komir harus mempertimbangkan dan mengakomodir Perdais tersebut, khususnya menganalisis aspek pengelolaan irigasi. Sikap psikologis umum masyarakat akan dipengaruhi oleh sumber air permukaan atau air tanah mengingat upaya yang harus ditempuh pada sumber air tanah lebih tinggi dibandingkan air permukaan, sehingga akan memberikan dampak terhadap perlunya penggunaan air secara efisien.	Kearifan Lokal Daerah
4	Setiap daerah memiliki karakteristik masing-masing, terdapat suatu daerah yang memiliki DI relatif besar berharap tidak ada perubahan batasan kewenangan daerah irigasi karena selama ini anggaran O&P dapat disediakan memadai. Namun, terdapat beberapa daerah yang selama ini menangani irigasi kewenangannya mengalami kendala penyediaan anggaran irigasi khususnya daerah luar jawa, sehingga seolah-olah anggaran O&P dalam posisi tidak prioritas. DIY memiliki 41 DI sesuai dengan Permen PU Nomor 14 Tahun 2015 dimana 35 irigasi lintas kabupaten dan kota, 6 irigasi utuh. Secara anggaran DIY tidak banyak mengalami kendala dari sistem operasi dan pemeliharaan karena DIY mengalokasikan biaya O&P diatas standar nasional yaitu 1,25jt/ha (standar Kementerian PUPR sebesar 1jt/ha). Terdapat kekecewaan jika irigasi yang menjadi kewenangan provinsi yang selama ini telah dilakukan pembinaan dan pemberdayaan yang cukup optimal harus dilimpahkan ke pusat yang dimana secara anggaran standar bantuan yang selama ini diterima masih dibawah standar nasional sehingga menimbulkan kekhawatiran akan menjadi potret buram bagi pengelolaan irigasi yang ada di DIY. Berdasarkan alokasi biaya O&P DIY yang telah melebihi standar nasional, ada kekhawatiran perubahan batasan kewenangan DI akan mempengaruhi pengelolaan mendatang. Jika masih dapat berubah, DIY mengusulkan terkait	Luas Wilayah

No.	Uraian Penyampaian	Sub Isu
	batas kewenangan provinsi seperti kewenangan yang semula, atau ada fleksibilitas dengan kemampuan masing-masing daerah sehingga tidak dibuat secara general.	
5	Pada bagian prosedur dan kriteria pembagian kewenangan sebaiknya perlu penegasan pengaturan, baik secara teknis maupun rambu-rambu kebijakannya.	Regulasi
6	Keterkaitan masalah kewenangan luasan jika masih bisa dimungkinkan sebaiknya tidak berubah, tetap pada kewenangan provinsi dari 1000 sampai 3000 ha, dan kewenangan pusat untuk 3000 ha ke atas, sementara untuk dibawah 1000 ha menjadi kewenangan kabupaten/kota. Dampaknya jika terjadi perubahan kewenangan luasan maka apa yang telah dijalani selama ini harus memulai kembali dari awal	Luas Wilayah

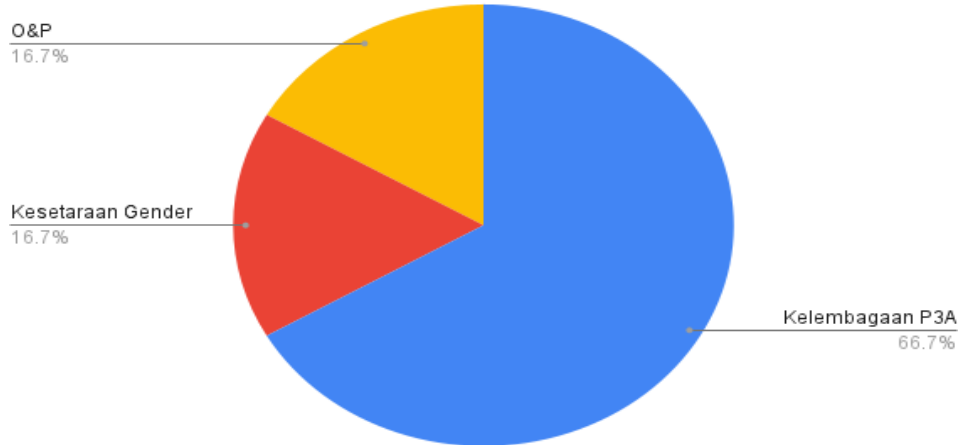
C.1.3. Isu Partisipasi Irigasi

Isu Partisipasi Irigasi menjadi isu yang mendapat perhatian (*concern*) cukup rendah dalam Forum Penjaringan Aspirasi Komisi Irigasi DIY. Dalam isu partisipasi irigasi mencakup sub isu O&P, Kesetaraan Gender, dan Kelembagaan P3A. Sebaran frekuensi sub isu dalam isu partisipasi irigasi dijelaskan pada **Tabel 6** dibawah.

Tabel 6 Sebaran Frekuensi dalam Isu Partisipasi Irigasi

Isu	Sub Isu	Jumlah
Partisipasi Irigasi	Kelembagaan P3A	4
	Kesetaraan Gender	1
	O&P	1
		6

ISU PARTISIPASI IRIGASI



Gambar 6 Persentase dalam Isu Partisipasi Irigasi

Berdasarkan Tabel 6 dan Gambar 6, sub isu kelembagaan P3A dalam partisipasi irigasi menjadi sub isu yang paling banyak disampaikan dalam forum. Sub isu kelembagaan P3A disampaikan oleh empat penyampai dengan persentase sebesar 66.7%. Sedangkan untuk sub isu O&P dan Kesetaraan gender disampaikan masing-masing oleh satu penyampai dengan persentase sebesar 16.7%. Uraian penyampaian masukan dalam isu partisipasi irigasi dijelaskan pada **Tabel 6** dibawah.

Tabel 7 Uraian Penyampaian dalam Isu Partisipasi Irigasi

No.	Uraian Penyampaian	Sub Isu
1	Perlu penegasan pengaturan mengenai pengelolaan jaringan irigasi tersier, agar terjadi sinergi antara petani dan petugas O&P.	O&P
2	Perlu meningkatkan partisipasi petani dan mengadministrasikan dengan baik agar bisa saling berkolaborasi. Partisipasi petani diharapkan sampai pada tingkat pelaporan kerusakan <i>real time</i> agar informasi dapat diterima dengan cepat dan akurat.	Kelembagaan P3A

Kementerian PPN/
Bappenas

3	<p>Partisipatif bisa menjadi beban dan dapat juga menjadi pendorong untuk pemberdayaan,</p> <p>Upaya untuk mendorong pemberdayaan organisasi petani itu sendiri dalam dimensi ini tampaknya mengalami keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan, sehingga pilihan untuk memberikan kegiatan partisipasi kepada petani terutama pada kegiatan O&P di tersier menjadi satu pilihan untuk memberdayakan petani.</p> <p>Jika petani disingkirkan dari proses kegiatan partisipasi keirigasian akan menjadi semakin termarginalkan, adanya keterlibatan organisasi petani dalam keirigasian jika dilihat dari sejarahnya akan selalu ada sehingga tidak dapat lepas dari konteks keirigasian.</p> <p>Pada RPP yang lama yaitu pada pasal 47 dikatakan petani diberi kewenangan dalam berpartisipasi dan mendapat bantuan dana hibah secara rutin tahunan, namun di versi yang baru 18 Mei 2022 pada pasal 49 dihapus untuk bantuan dana hibah rutin. Sebaiknya dana hibah rutin dalam O&P di tersier perlu selalu dilakukan karena manfaatnya akan terjadi interaksi yang intens antara P3A dengan pemerintah sehingga dapat menjadi semangat untuk selalu berhubungan melakukan pembinaan kepada P3A.</p>	Kelembagaan P3A
4	<p>Untuk menuju P3A yang baik dan mandiri perlu dilihat juga tenaga pendamping masyarakat selaku fasilitator, terutama keterbatasan staf dinas PU provinsi, kota, dan balai yang telah memiliki beban yang banyak namun masih perlu melakukan pendampingan dan pemberdayaan P3A tanpa adanya TPM. Sebaiknya ketika membuat sebuah deskripsi P3A yang baik dan mandiri perlu diikuti dengan adanya TPM yang berkompetisi dengan <i>skill</i> dan <i>attitude</i> yang baik sebagai penerjemah di lapangan.</p> <p>dengan adanya P3A yang terdaftar dengan baik merupakan suatu hal yang penting agar dapat tepat sasaran ketika adanya dana hibah atau kebutuhan informasi lainnya.</p>	Kelembagaan P3A
5	<p>Perlu adanya apresiasi kepada para petani dan para penerus P3A yang bertujuan untuk meningkatkan partisipatif</p>	Kelembagaan P3A
6	<p>Harapannya dalam RPP Irigasi perlu dimasukkan kepentingan perempuan yang dinyatakan secara tegas, seperti misalnya pada pasal 11 dapat ditambahkan menjadi petani pemakai air wajib membentuk perkumpulan petani pemakai air dan menambahkan salah satu kalimat yaitu dengan memperhatikan keterwakilan perempuan pada setiap daerah atau juga dapat disebutkan secara lebih tegas dengan memberikan persentase keterlibatan perempuan.</p>	Kesetaraan Gender

Bappenas

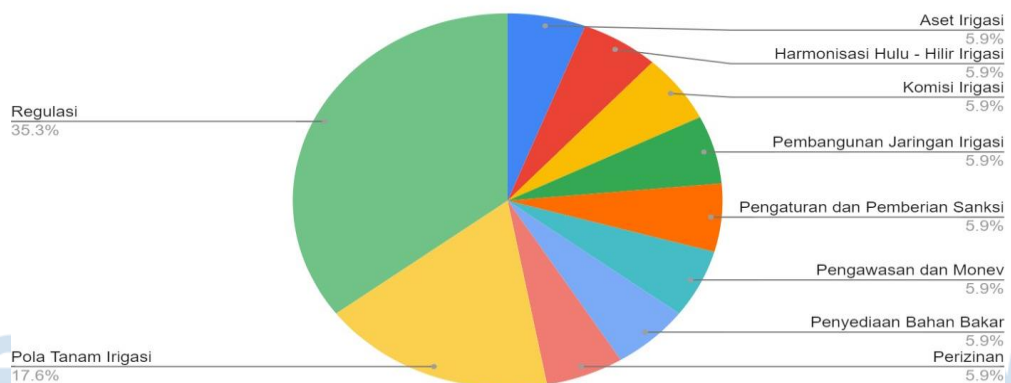
C.1.4. Isu Pengelolaan Irigasi

Masukan dalam FGD terhadap isu Pengelolaan Irigasi dapat dirumuskan dalam **Tabel 8** dan **Gambar 7** berikut.

Tabel 8 Masukan Isu Pengelolaan Irigasi

Isu	Sub Isu	Jumlah
Pengelolaan Irigasi	Aset Irigasi	1
	Harmonisasi Hulu - Hilir Irigasi	1
	Komisi Irigasi	1
	Pembangunan Jaringan Irigasi	1
	Pengaturan dan Pemberian Sanksi	1
	Pengawasan dan Monev	1
	Penyediaan Bahan Bakar	1
	Perizinan	1
	Pola Tanam Irigasi	3
	Regulasi	6
		17

ISU PENGELOLAAN IRIGASI



Gambar 7 Persentase dalam Isu Pengelolaan Irigasi

Berdasarkan pada **Tabel 8** dan **Gambar 7** tersebut, pembahasan terkait dengan pengelolaan irigasi meliputi 1) regulasi sebesar 35.3% dan 2) pola tanam irigasi sebesar 17.6%. Sementara isu lainnya masing-masing sebesar 5.9% untuk isu 1) aset irigasi; 2) harmonisasi hulu – hilir; 3) komisi irigasi; 4) pembangunan jaringan irigasi; 5) pengaturan dan pemberian sanksi; 6) pengawasan dan monev; 7) penyediaan bahan bakar; 8) perizinan. Uraian penyampaian isu SMI dapat dilihat pada **Tabel 9** berikut.

Tabel 9 Uraian Penyampaian dalam Isu Pengelolaan Irigasi

No	Uraian Penyampaian	Sub Isu
1	<p>Bidang O&P PU SDA Kabupaten Kulon Progo menyampaikan pengelolaan air irigasi di Kabupaten Kulon Progo telah menyusun Perbup No. 35/2022 tentang Pola dan Tata Tanam yang memiliki 3 golongan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gol I (DI Kalibawang Hulu, DI Penjalin, dan Petik Jamal, dan DI Sapon); - Gol. II (DI Babak); - Gol. III (di wilayah hilir DI Pengasih timur dan DI Pengasih Barat) <p>Pola tanam Kulon Progo adalah padi-padi-palawija. Kabupaten Kulon Progo sendiri telah menargetkan peningkatan IP 400 dan fokus dilaksanakan pada DI kecil.</p>	Pola Tanam Irigasi
2	<p>Berkenaan dengan pembagian golongan tersebut, waktu yang terbatas bagi pengolahan tanah menjadi faktor pembatas meskipun sudah ada mekanisasi dari pemerintah. Sehingga, keterbatasan pengolahan tanah tersebut harus menjadi bahasan dalam sidang Komir yang menjadi bagian dari peningkatan kinerja Komir. Dengan demikian, pembagian golongan air tersebut dapat ditepati agar pemanfaatan air irigasi dapat optimum.</p>	Pola Tanam Irigasi
3	<p>Bapak Tukimin, Ketua GP3A Kecamatan Semanu yang membawahi 5 irigasi pompa dan Anggota Komir Gunung Kidul menyampaikan bahwa terdapat kendala dimana 1 (satu) P3A yang dulu telah mengairi 80 ha/minggu, namun mangkrak karena petani merasa keberatan untuk menyediakan bahan bakar untuk pompa karena harga bahan bakar yang mahal.</p>	Penyediaan Bahan Bakar
4	<p>GP3A bersama Dinas PU dan PDAM telah berdiskusi terkait dengan potensi alih fungsi pemanfaatan air menjadi sumber air minum. Sumber air PDAM sendiri dari sungai dalam tanah dan sumur bor. Namun belum disediakan sumur untuk penggunaan air irigasi pertanian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana agar petani mendapatkan irigasi kembali (minimal 60 ha). 2. Terdapat sumur bor (dangkal dan dalam) yang dimanfaatkan oleh PDAM, namun peralatan aset PDAM diambil kembali dan tidak memanfaatkan sumur bor tersebut. Petani sangat berharap pemerintah dapat menyediakan peralatan sumur bor agar sumber air dapat dimanfaatkan untuk penyediaan air irigasi pertanian, dengan debit minimal 10 lt/dt, cukup untuk pola tanam padi-padi palawija. 	Aset Irigasi
5	<p>Dalam rangka memanfaatkan sumur bor, disarankan untuk menggunakan pola tanam dengan tanaman bernilai tinggi agar efisiensi air dapat tercapai. Pola ini bisa dibuatkan skema dengan mempertimbangkan kebutuhan air; dan ketersediaan air untuk tanaman padi dan hortikultura; serta sifat porous tanah khususnya pada musim kemarau. Dengan demikian, dapat dibandingkan dengan biaya air untuk PDAM.</p>	Pola Tanam Irigasi
6	<p>Mengingat keperluan pemanfaatan air oleh berbagai pihak, keperluan pemanfaatan untuk rumah tangga perlu dibahas lebih lanjut di Komir sebagai wadah sesuai tusi Komir.</p>	Komisi Irigasi
7	<p>Mengingat pelayanan terdekat, pelaksanaan kegiatan teknis dilaksanakan oleh kabupaten/kota, sehingga Dinas Provinsi hanya bisa melaksanakan pengawasan dan monev.</p>	Pengawasan dan Monev
8	<p>Berkenaan dengan pengambilan air dan perizinannya, ada pengambilan air perpompaan besar yang dilakukan oleh Pertanian dan mayoritas mengambil dari sumur bor dan sungai, dimana sungai merupakan kewenangan BBWS. Karena untuk kepentingan petani (bukan pengusaha/swasta), apakah kelompok petani harus ijin/membuat surat persetujuan/izin rekomtek</p>	Perizinan

No	Uraian Penyampaian	Sub Isu
	Pengambilan air dari Balai? siapa yang mengurus persetujuan, petani/pembina?	
9	Perlu adanya peraturan mengenai pengelolaan dan penanganan permasalahan yang ada di saluran, yaitu terkait sampah yang dibuang sembarangan sehingga mengganggu penanganan di bagian hulu dan hilir saluran.	Regulasi
10	Perlu adanya peraturan mengenai penanganan bangunan diatas saluran primer sehingga mengganggu dalam operasi dan pemeliharaan saluran.	Regulasi
11	Perlu adanya peraturan mengenai penggunaan air irigasi untuk perikanan demi optimalisasi pemanfaatan air.	Regulasi
12	Perlu adanya peraturan yang menangani sampah dan perlu dibahas dalam komir untuk mendorong Bappeda berperan dalam penanganan pengelolaan sampah, sehingga tidak menjadi beban Dinas PU/SDA akibat banyaknya sampah di saluran irigasi.	Regulasi
13	Perlu adanya peraturan tentang pengelolaan dan pembagian air irigasi antara irigasi pertanian rakyat yang meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Hal-hal tersebut sebaiknya diatur dalam RPP agar tidak menimbulkan konflik dalam pengaturan dan pengelolaan air irigasi .	Regulasi
14	Air untuk perikanan menjadi permasalahan di banyak lokasi. Hal tersebut belum diatur dalam blanko O&P. Sehingga banyak yang tidak menggunakan izin. Kedepannya akan diatur lebih detail dalam peraturan turunan dan diputuskan terkait alokasi dan siklus pengairan.	Regulasi
15	Mengingat masih adanya masyarakat yang melakukan pelanggaran mendirikan bangunan diatas saluran irigasi berdampak pada terganggunya aliran air, sehingga perlu adanya aturan yang dapat memberikan efek jera bagi masyarakat dengan memberikan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang melanggar.	Pengaturan dan Pemberian Sanksi
16	Harmonisasi antara hulu dan hilir adalah suatu hal yang sangat penting dalam irigasi sehingga perlu masuk dalam RPP Irigasi.	Harmonisasi Hulu -Hilir Irigasi
17	Perlu juga menjadi perhatian mengenai kualitas bangunan agar air tidak terbuang, khususnya pada tanah yang porous dan pada saluran irigasi dengan timbunan karena talud dan rantai yang bocor, dan jaringan primer perlu dibangun cor beton seperti pada DI Payaman.	Pembangunan Jaringan Irigasi

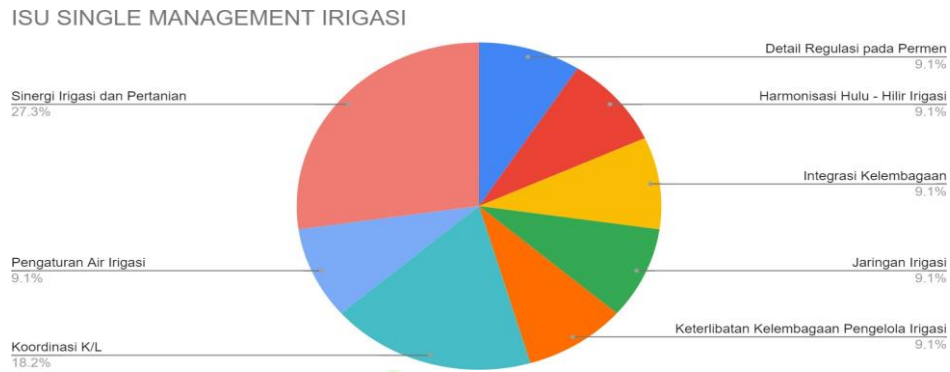
C.1.5. Isu *Single Management Irigasi*

Masukan dalam FGD terhadap isu *Single Management Irigasi* dapat dirumuskan dalam Tabel 10 dan Gambar 8 berikut.

Tabel 10 Sebaran Frekuensi dalam Isu *Single Management Irigasi*

Isu	Sub Isu	Jumlah
Single Management Irigasi	Detail Regulasi pada Permen	1
	Harmonisasi Hulu - Hilir Irigasi	1
	Integrasi Kelembagaan	1
	Jaringan Irigasi	1
	Keterlibatan Kelembagaan Pengelola Irigasi	1

Isu	Sub Isu	Jumlah
	Koordinasi K/L	2
	Pengaturan Air Irigasi	1
	Sinergi Irigasi dan Pertanian	3
		11



Gambar 8 Persentase dalam Isu *Single Management* Irigasi

Berdasarkan pada Tabel 10 dan Gambar 8 tersebut, pembahasan terkait dengan *single management* irigasi meliputi 1) sinergi irigasi dan pertanian sebesar 27.3% dan 2) koordinasi K/L sebesar 18.2% Sementara isu lainnya masing-masing sebesar 9.1% untuk isu 1) pengaturan air irigasi; 2) detail regulasi pada permen; 3) harmonisasi hulu – hilir irigasi; 4) integrasi kelembagaan; 5) jaringan irigasi; dan 6) keterlibatan kelembagaan pengelola irigasi. Uraian penyampaian isu SMI dapat dilihat pada **Tabel 11** berikut.

Tabel 11 Uraian Penyampaian dalam Isu *Single Management* Irigasi

No	Uraian Penyampaian	Sub Isu
1	Perlu harmonisasi hulu-hilir di irigasi , dan perlunya kepatuhan pemakai air dalam mentaati Perbup Kabupaten Kulon Progo tentang Pola dan Tata Tanam agar pengelolaan air irigasi menjadi optimal. Sebagai contoh DI yang sudah mendapatkan air (Kalibawang) perlu segera melakukan olah tanah, sehingga kebutuhan air di bagian hilir bisa mendapatkan bagian atau persiapan pelaksanaan kegiatan irigasi. Selain itu secara teknis juga terdapat sistem interkoneksi, dimana pengelolaan dan pembagian irigasi saling mempengaruhi, sehingga ketaatan terhadap pola tanam harus menjadi perhatian.	Harmonisasi Hulu -Hilir Irigasi
2	Perlu penegasan pengaturan dalam RPP Irigasi terkait kerja sama antara OPD yang menangani pertanian dan irigasi yaitu Dinas Pertanian dan Dinas PU/SDA agar bersinergi dalam memberikan layanan kepada petani.	Sinergi Irigasi dan Pertanian
3	Begitu pula dengan kelembagaan Poktan dan P3A serta merumuskan kerjasama antar petani dalam kerangka merespon SMI, walaupun SMI tidak akan menjadi istilah dalam pengaturan pengelolaan irigasi. Demikian juga dengan izin yang memerlukan penegasan pengaturan termasuk pengambilan air di sungai dan entitas (<i>person</i> atau badan hukum) yang mengajukan ijin.	Integrasi Kelembagaan

No	Uraian Penyampaian	Sub Isu
4	Pengaturan dalam RPP Irigasi akan mengacu pada kaidah penyusunan kerangka regulasi yang pada prinsipnya hal-hal yang lebih detail atau rinci akan menjadi peraturan teknis (Permen).	Detail Regulasipada Permen
5	Dengan adanya 2 (dua) SKPD pengelola air yakni Dinas PU/SDA dan Dinas Pertanian, harus menjadi perhatian Bappeda/Komir agar bersinergi dan saling terintegrasi. Di samping itu, beberapa instansi juga berkepentingan terhadap saluran tersier yang memerlukan keterpaduan pengelolaannya, termasuk peran Kemendes/Pemdes.	Sinergi Irigasi danPertanian
6	Isu keterbatasan SDM pelaksana teknis di kabupaten/kota merupakan hal yang selalu muncul dalam forum RPP Irigasi sebelumnya.	Sinergi Irigasi danPertanian
7	Irigasi harus menjadi satu kesatuan sistem dengan lima pilar irigasi. Dalam konteks tersebut, DIY sudah diuji penyusunan Raperda irigasi baik di forum publik dengan keterlibatan komir, P3A, akademisi dan pemerintah pusat. Dalam konteks DIY, sistem irigasi tidak hanya dilihat sebagai kewenangan konkuren, namun secara spesifik mempunyai basis kebudayaan/norma. DIY punya Perda Istimewa, bahwa politik hukum sistem irigasi menjadi objek kebudayaan.	Keterlibatan Kelembagaan Pengelola Irigasi
8	Dalam UU No. 17/2019 tentang SDA tegas menjelaskan bahwa petani dibebaskan dari biaya pengelolaan irigasi mengingat irigasi merupakan layanan publik yang harus disediakan oleh negara. Satu kesatuan sistem irigasi menjadi dasar untuk pengelolaan irigasi dimana menggunakan sistem gravitasi berdasarkan topografi.	Pengaturan AirIrigasi
9	Dalam UU No. 17/2019 tentang SDA pasal 10, 13, dan 15 yang memuat mengenai Single Management Irigasi , bahwa pelaksanaannya dapat dilakukan oleh beberapa pihak, seperti pusat, provinsi, dan kabupaten. Namun, dalam UU tersebut tidak mencantumkan batasan kewenangan, yang kemudian penetapan statusnya akan diatur dalam RPP Irigasi. Penentuan batas luasan kewenangan daerah irigasi telah dianalisa berdasarkan kajian dan FGD, ditambah dengan pertimbangan irigasi lintas kab/prov/negara/perbatasan. Dalam pelaksanaannya Kementerian Pertanian, Pemerintah Desa, dan Kementerian Desa PDTT dapat melaksanakan pengelolaan dan O&P jaringan tersier. Sehingga, diperlukan koordinator dan koordinasi antar K/L dalam pengelolaan irigasi.	Koordinasi K/L
10	Mendukung keandalan SDA sebagai pilar irigasi, perlu adanya sinkronisasi antara kegiatan pengembangan pada DAS, mengingat kondisi air Sungai Progo yang semakin menurun. Sehingga hal ini menjadi isu yang harus dibahas dalam komir provinsi dan K/L untuk menjamin ketersediaan air.	Koordinasi K/L
11	Pada area DI Payaman harus mendapatkan perhatian mengenai pentingnya memberikan koridor dalam RPP Irigasi terhadap <i>outcome</i> rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan dengan menekankan keberfungsian jaringan irigasi berdasarkan sistem. Hal tersebut digambarkan pada rehabilitasi jaringan DI Payaman sepanjang 3270 m, namun pada tahun 2009 dilakukan rehabilitasi sepanjang 2000 m yang dapat mengairi 1040 ha. Penuntasan rehabilitasi DI Payaman tersebut sampai saat ini masih menjadi wacana, sehingga masih terdapat sebagian lahan yang belum terairi.	Jaringan Irigasi

Berdasarkan pada Tabel 11 sub isu SMI yang dibahas meliputi 8 sub isu dengan pembahasan paling banyak terkait sinergi antara pelaksanaan kegiatan irigasi dan pertanian

serta perlunya koordinasi antar K/L.

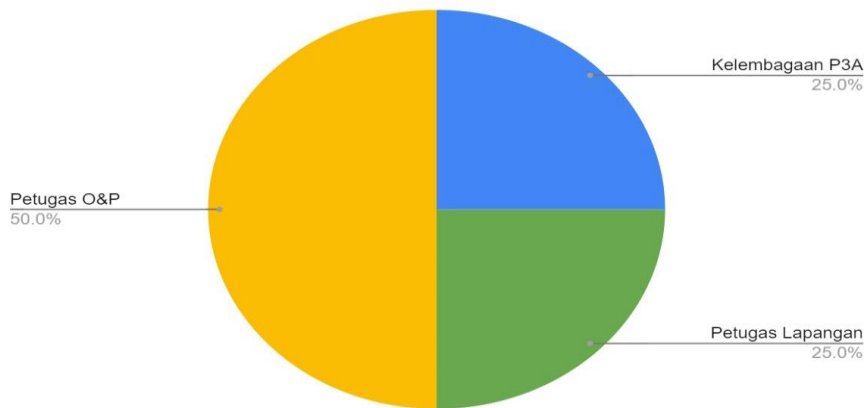
C.1.6. Isu Sumber Daya Manusia

Masukan dalam FGD terhadap isu *Single Management* Irigasi dapat dirumuskan dalam **Tabel 12** dan **Gambar 9** berikut.

Tabel 12 Sebaran Frekuensi dalam Isu Sumber Daya Manusia

Isu	Sub Isu	Jumlah
Sumber Daya Manusia	Kelembagaan P3A	1
	Petugas Lapangan	1
	Petugas O&P	2
Total		4

ISU SUMBER DAYA MANUSIA



Gambar 9 Persentase dalam Isu Sumber Daya Manusia

Berdasarkan pada Tabel 12 dan Gambar 9 tersebut, pembahasan terkait dengan sumber daya manusia meliputi petugas operasi dan pemeliharaan (O&P) sebesar 50%, kelembagaan P3A sebesar 25%, dan petugas lapangan yang bertugas dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi sebesar 25%. Uraian penyampaian isu SDM dapat dilihat pada **Tabel 13** berikut.

Tabel 13 Uraian Penyampaian dalam Isu Sumber Daya Manusia

No	Uraian Penyampaian	Sub Isu
1	Perlu dikaji dan dipertimbangkan kembali mengenai pembagian tugas dan kewenangan petugas O&P dengan mempertimbangkan kemampuan SDM yang ada.	Petugas O&P
2	Nomenklatur dan kualifikasi pendidikan tenaga pengelola irigasi perlu diselaraskan dengan nomenklatur dalam KemenpanRB agar terjadi sinergi antar aspek teknis dan administratif di lapangan, sehingga memperjelas status kepegawaian.	Petugas Lapangan

No	Uraian Penyampaian	Sub Isu
3	Pelaksanaan O&P pada jaringan tersier yang dibebankan kepada P3A perlu dikaji ulang agar sejalan dengan prinsip <i>Single Management</i> Irigasi.	Kelembagaan P3A
4	Kebutuhan SDM dalam pengelolaan jaringan irigasi khususnya pada level operasional harus memperhatikan ketersediaan pengamat, juru sampai P3A.	Petugas O&P

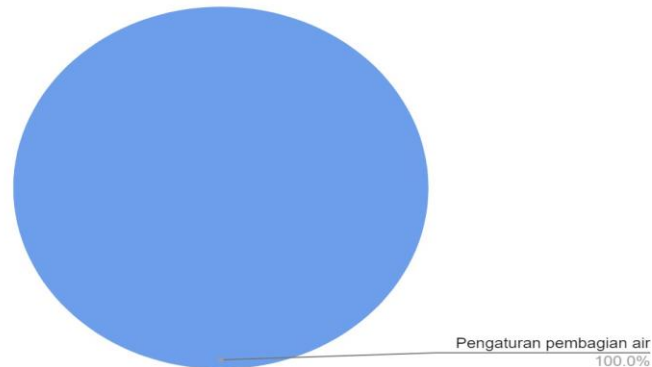
C.1.7. Isu Tata Kelola Air

Masukan dalam FGD terhadap isu Tata Kelola Air dapat dirumuskan dalam **Tabel 14** dan **Gambar 10** berikut.

Tabel 14 Sebaran Frekuensi dalam Isu Tata Kelola Air

Isu	Sub Isu	Jumlah
Tata kelola air	Pengaturan pembagian air	4
Total		4

ISU TATA KELOLA AIR



Gambar 10 Persentase dalam Isu Tata Kelola Air

Berdasarkan pada Tabel 14 tersebut, sub isu tata kelola air adalah adanya pengaturan pembagian air. Uraian masukan/penyampaian isu Tata Kelola Air dalam forum dapat dirumuskan pada **Tabel 15** berikut.

Tabel 15 Uraian Penyampaian dalam Isu Tata Kelola Air

No	Uraian Penyampaian	Sub Isu
1	Mempertimbangkan efisiensi penggunaan air, diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai penggunaan air di luar pertanian yang harus kembali ke saluran irigasi. Hal tersebut dimaksudkan agar petani tidak merasa dirugikan dalam pembagian air.	Pengaturan pembagian air
2	Ketersediaan air ketika musim kemarau dan penghujan perlu menjadi pertimbangan dalam pembagian (alokasi) air .	Pengaturan pembagian air
3	Pembagian air untuk keperluan perikanan dan pertanian perlu diatur secara tegas agar tidak terjadi konflik.	Pengaturan pembagian air

No	Uraian Penyampaian	Sub Isu
4	Berdasarkan informasi Bapak Supriyono Dinas KKP Kabupaten Gunung Kidul, terdapat potensi perikanan di 2 (dua) Kecamatan Karangmojo dan Kecamatan Ponjong dimana terdapat bangunan/saluran irigasi yang berkonstruksi beton di Daerah Susukan mangkrak selama 6 (enam) tahun. Hal tersebut mengakibatkan budidaya ikan harus mengupayakan sumber air dengan pompa yang memerlukan waktu 5 jam, sedangkan dari sumur ke pompa itu membutuhkan waktu 2 jam. Namun pembudidaya ikan berkompromi dengan durasi pompa selama 3 jam dengan biaya pompa sebesar Rp 65.000/jam. Hal-hal tersebut perlu menjadiperhatian dalam pengaturan RPP Irigasi dan Permen dan juga sebagai contoh hasil pembahasan sidang komir (kompromi) pemanfaatan air secara bersama antara pertanian dan perikanan.	Pengaturan pembagian air

Berdasarkan pada Tabel 15 diatas, dapat dilihat bahwa usulan yang dibahas adalah terkait pengaturan pembagian air, dimana pemanfaatan air tidak hanya untuk irigasi, namun ada penggunaan/pemanfaatan air lain seperti air minum (PDAM).



*Kementerian PPN/
Bappenas*

D. Penutup

Pada Forum Diskusi Penjaringan Aspirasi Komisi Irigasi guna menyempurnakan RPP Irigasi ini didapatkan beberapa poin kesimpulan dari hasil masukan peserta diskusi sebagai berikut:

1. Kelembagaan

Pada diskusi ini banyak peserta forum yang menyampaikan masukan terkait kelembagaan P3A. Adanya aspirasi dan masukan dari peserta forum untuk membentuk P3A dalam suatu badan hukum (terdaftar secara hukum) guna mendapatkan hak-haknya. Kemudian terkait pembinaan dan pelatihan untuk P3A masih perlu kejelasan dalam tanggung jawab pelaksanaannya.

2. Kewenangan

Pada diskusi ini disampaikan juga tentang kewenangan. Kewenangan ini mencakup luas wilayah Daerah Irigasi, Kearifan Lokal Daerah, Pembagian Peran Stakeholder dan Regulasi. Rumusan dalam RPP Irigasi tentang perubahan batas luas daerah irigasi yang berdampak pada kewenangan daerah irigasi di tingkat daerah menimbulkan kekecewaan Pemerintah Provinsi DIY. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi DIY mengusulkan untuk tetap mempertahankan kewenangan daerah irigasinya, karena Daerah Irigasi yang selama ini dikelola telah mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan yang cukup optimal. Muncul kekhawatiran adanya perubahan kewenangan daerah irigasi dimana kewenangan provinsi yang menjadi andalan diambil alih oleh Pemerintah Pusat, maka akan terjadi penurunan kinerja dalam pemeliharaan, pembinaan, dan pemberdayaannya. Aspirasi mengenai kebudayaan dan kearifan lokal daerah juga muncul dan sering disampaikan dalam diskusi ini. Dalam penyempurnaan RPP Irigasi sebaiknya mempertimbangkan kearifan lokal masing-masing daerah yang nantinya dituangkan dalam Peraturan Menteri secara lebih detail.

3. Partisipasi Irigasi

Isu Partisipasi Irigasi yang disampaikan dalam Forum Aspirasi ini banyak membahas pelaksanaan partisipasi di tingkat pelaksana terutama dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan daerah irigasi. Partisipasi ini diharapkan melibatkan Poktan, P3A, dan K/L terkait serta melibatkan peran perempuan dalam lingkup P3A. Pada Forum ini banyak peserta yang menginginkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi yang dipertegas pengaturannya dalam RPP Irigasi.

4. Pengelolaan Irigasi

Pada forum diskusi ini banyak disampaikan mengenai pengelolaan irigasi yang mencakup harmonisasi hulu hilir, tugas dan wewenang komir, pembangunan jaringan irigasi, pemberian sanksi, dan yang paling banyak yaitu mengenai perlunya regulasi atau pengaturan dalam pengelolaan irigasi. Dengan mempertimbangkan amanah UU No. 17/2019 tentang Sumber Daya Air khususnya mengenai prinsip satu kesatuan sistem jaringan irigasi dan panduan teknis (KP Irigasi), peran antar K/L perlu dipertegas kewenangannya dalam pengelolaan irigasi. Selain terkait kewenangan pengelolaan irigasi, dalam forum disampaikan bahwa pemeliharaan aset irigasi perlu dilakukan dan ditambahkan pengaturannya dalam RPP Irigasi serta Permen terkait.

Permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan irigasi adalah banyaknya kegiatan-kegiatan yang melanggar kaidah pengelolaan irigasi, sehingga hal-hal tersebut perlu kiranya diatur dan dipertegas terkait sanksinya.

5. *Single Management* Irigasi

Pembahasan isu *Single Management* Irigasi dalam forum ini lebih ditekankan pada peran dari setiap K/L yang terlibat dalam pengelolaan irigasi. Prinsip SMI yang meliputi prinsip *One Map Policy* perlu dituangkan secara eksplisit dalam RPP Irigasi agar dapat menjadi referensi seluruh pihak yang terlibat didalam pengelolaan irigasi. Sinergi Irigasi dan Pertanian juga dibutuhkan untuk memberikan layanan kepada petani.

6. Sumber Daya Manusia

Isu Sumber Daya Manusia dalam pembahasan forum diskusi ini disampaikan terkait kebutuhan SDM di lapangan serta peran P3A dalam operasi dan pemeliharaan. Pengaturan terkait Sumber Daya Manusia perlu dipertimbangkan dalam RPP Irigasi yang mencakup istilah teknis, standar pendidikan, kualifikasi dan status kepegawaian.

7. Tata Kelola Air

Perlunya pengaturan air irigasi untuk penggunaan air di luar pertanian menjadi isu yang sering disampaikan dalam forum diskusi ini. Hal tersebut dikarenakan di DIY banyak kegiatan perikanan yang menggunakan air pertanian dan pengelolaannya dinilai merugikan pihak petani (air yang digunakan perikanan tidak kembali ke saluran irigasi, melainkan dibuang langsung ke sungai). Dalam hal ini forum memberikan masukan dan aspirasi untuk mempertimbangkan tata kelola air antara kegiatan pertanian dan non pertanian dalam RPP Irigasi.

Mempertimbangkan masukan penyempurnaan RPP Irigasi dari Pemerintah Daerah, terlampir disertakan juga Rumusan Forum Asistensi dan Supervisi Provinsi dalam Rangka Integrasi Pengelolaan Sumber Daya Air yang dilaksanakan oleh Direktorat SUPD II, Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri (termasuk *recording zoom meeting*).

Kementerian PPN/
Bappenas

E. Lampiran

E.1. Lampiran Bahan Forum RPP Irigasi Sebelumnya

Sebagai salah satu upaya diseminasi pengetahuan dalam kerangka *Knowledge Management Center*, notulensi dan rekaman video pelaksanaan Forum RPP Irigasi yang telah dilaksanakan sebelumnya dapat diakses melalui link berikut:

Forum RPP Irigasi 2021 dengan KNI-ID/INACID

- a. Link Rekaman Video:
 - i. Tahap I: <https://www.youtube.com/watch?v=KfBaWkgim0A&t=25767s>
 - ii. Tahap II: <https://www.youtube.com/watch?v=JaTfpiZfVGI&t=14483s>
 - iii. Tahap III: <https://www.youtube.com/watch?v=YW4RhNrCozI>
- b. Bahan Paparan:
 - i. Tahap I: <https://bit.ly/ForumDiskusiIrigasi>
 - ii. Tahap II: <https://bit.ly/BahanRPPIrigasi2>
 - iii. Tahap III: <https://link.bappenas.go.id/BahanRPPIrigasi3>
- c. Link Notulensi: <https://link.bappenas.go.id/NotulensiForumRPPIrigasi2021>

Forum RPP Irigasi 2022 dengan Paguyuban O&P

- a. Link Rekaman Video: <https://link.bappenas.go.id/YtRPPIrigasiOP>
- b. Bahan Paparan: <https://bit.ly/ForumRPPIrigasi0122>
- c. Link Notulensi: https://link.bappenas.go.id/NotulensiForumRPPI_PaguyubanOP

Forum RPP Irigasi 2022 dengan Konsultan dan Pemerintah Daerah

- a. Link Rekaman Video: <https://link.bappenas.go.id/YtRPPIrigasiKonsultan>
- b. Bahan Paparan: <https://link.bappenas.go.id/PaparanRPPIrigasi140422>
- c. Link Notulensi: <https://link.bappenas.go.id/NotulensiRPPIrigasi140422>

Forum RPP Irigasi 2022 terkait Isu Irigasi Rawa

- a. Link Rekaman Video: <https://link.bappenas.go.id/YtForumRPPIrigasiIsuRawa>
- b. Bahan Paparan: <https://link.bappenas.go.id/PaparanRPPIrigasi02Juni>
- c. Link Notulensi: <https://link.bappenas.go.id/NotulensiRPPIrigasi020622>

Forum Asistensi dan Supervisi Provinsi dalam Rangka Integrasi Pengelolaan Sumber Daya Air

- a. Link Rekaman Video: <https://bit.ly/RumusanRapatBangda-RPPIrigasi>
- b. Link Notulensi: <https://bit.ly/NotulRumusanBinaBangda>

Forum Aspirasi Komisi Irigasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

- a. Link Rekaman Video: <https://link.bappenas.go.id/VidForumKomirDIY>

E.2. Lampiran Surat Undangan



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310
TELEPON (021) 3926186; FAKSIMILE (021) 3149641
www.bappenas.go.id

Nomor : 07745 /PP.05.01/Dt.6.1/T/06/2022 Jakarta, 17 Juni 2022
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Penjaringan Aspirasi Komisi Irigasi DIY

Yth.
(mohon periksa daftar lampiran)

Menindaklanjuti surat undangan Penjaringan Aspirasi Komisi Irigasi DIY dengan tema masukan untuk RPP Irigasi dari Kepala Sekretariat Komisi Irigasi DIY No. 611/19522 pada tanggal 14 Juni 2022 sebagaimana terlampir, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/I untuk ikut menghadiri teleconference meeting melalui media zoom pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Juni 2022
Waktu : 09.00 - selesai WIB
Link Zoom : ID meeting : 70 9999 8888 dan password: rppirigasi
https://bit.ly/forum_rpp_irigasi
Agenda : Masukan untuk RPP tentang Irigasi

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Pengairan dan Irigasi

Abdul Malik Sadat Idris

Tembusan :
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas

Lampiran : Penyampaian Undangan Penjaringan
Aspirasi Komisi Irigasi DIY
Nomor : /PP.05.01/Dt.6.1/T/06/2022
Tanggal : Juni 2022

DAFTAR PEJABAT / PEGAWAI YANG DIUNDANG

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1. Direktur Irigasi dan Rawa, Ditjen Sumber Daya Air;
2. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen Sumber Daya Air;

Kementerian Dalam Negeri

3. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I, Ditjen Bangda;
4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II, Ditjen Bangda.



***Kementerian PPN/
Bappenas***